

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dipicu oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu persoalan yang menonjol dalam konteks tersebut adalah pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dari aspek kesehatan masyarakat, sosial, maupun lingkungan. Penumpukan sampah berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, menurunkan kualitas estetika lingkungan, serta menjadi sumber berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi perhatian pada tingkat nasional, tetapi juga merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan global. Pengelolaan sampah yang belum optimal berdampak langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 11 yang menekankan pentingnya pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta SDG 12 yang berfokus pada pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDG

12 menegaskan pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan melalui pengurangan timbulan sampah, peningkatan praktik daur ulang, serta penerapan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Indonesia, termasuk pada tingkat desa, tidak hanya berperan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Nations, 2015).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 35,01 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 38,78% atau 13,57 juta ton yang berhasil dikelola, sementara 61,22% atau sekitar 21,43 juta ton lainnya masih belum terkelola secara optimal (KLHK, 2024). Data tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi pengurangan sampah masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 1,11%. Sebagian besar penanganan sampah masih dilakukan melalui fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan sekitar 8,55 juta ton dikelola menggunakan sistem *sanitary landfill* dan 6,76 juta ton masih menggunakan sistem *open dumping*. Kondisi ini menggambarkan besarnya tantangan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pengurangan dan pemanfaatan sampah di tingkat lokal, seperti desa.

Selain data timbulan sampah pada tingkat nasional, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) juga menyediakan informasi mengenai distribusi timbulan sampah pada tingkat provinsi. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, di mana sebagian besar provinsi dengan volume timbulan sampah terbesar berada

di Pulau Jawa. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mayoritas provinsi di wilayah tersebut secara konsisten mencatat tingkat timbulan sampah yang tinggi.

Tabel 1. 1 Timbulan Sampah di Pulau Jawa Tahun 2024

No	Provinsi	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
1.	Banten	5.503,94	2.008.938,74
2.	DKI Jakarta	3.384,62	1.235.385,32
3.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.940,71	708.359,03
4.	Jawa Barat	14.940,40	5.453.247,43
5.	Jawa Tengah	13.469,69	4.916.437,48
6.	Jawa Timur	17.519,06	6.394.458,47

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada 10 Oktober 2025

Berdasarkan data tersebut, timbulan sampah pada tingkat provinsi di wilayah Pulau Jawa menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menghasilkan volume sampah harian sebesar 13.469,69 ton atau mencapai 4.916.437,48 ton per tahun pada 2024. Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah pada posisi ketiga sebagai provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Besarnya volume timbulan sampah tersebut mencerminkan tingginya aktivitas domestik masyarakat serta dinamika urbanisasi yang terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan timbulan sampah belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sistem pengelolaan sampah yang memadai, khususnya pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1. 2 Timbulan Sampah Tingkat Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
1.	Kab. Banyumas	731.43	266,971.66
2.	Kab. Purbalingga	513.67	187,488.27
3.	Kab. Purworejo	323.12	117,937.34
4.	Kab. Magelang	668.71	244,077.51
5.	Kab. Boyolali	299.79	109,424.60
6.	Kab. Klaten	653.97	238,699.57
7.	Kab. Sukoharjo	366.59	133,804.91
8.	Kab. Wonogiri	348.40	127,166.54
9.	Kab. Karanganyar	382.05	139,446.94
10.	Kab. Sragen	598.49	218,449.22
11.	Kab. Grobogan	865.25	315,817.20
12.	Kab. Rembang	266.20	97,163.15
13.	Kab. Pati	679.68	248,083.93
14.	Kab. Kudus	438.91	160,202.33
15.	Kab. Jepara	432.65	157,915.99
16.	Kab. Demak	626.49	228,667.03
17.	Kab. Semarang	538.96	196,718.94
18.	Kab. Temanggung	405.90	148,153.14
19.	Kab. Kendal	437.22	159,584.72
20.	Kab. Pekalongan	402.95	147,078.06
21.	Kab. Tegal	661.94	241,609.56
22.	Kab. Brebes	1,021.54	372,861.55
23.	Kota Magelang	80.86	29,515.10
24.	Kota Surakarta	420.17	153,360.91
25.	Kota Salatiga	115.06	41,995.35
26.	Kota Semarang	1,189.71	434,243.97

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada 10 Oktober 2025

Pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, distribusi timbulan sampah menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah administratif. Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Magelang menghasilkan timbulan sampah harian sebesar 668,71 ton atau mencapai 244.077,51 ton per tahun. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah dengan volume timbulan sampah yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Besarnya timbulan sampah ini mencerminkan meningkatnya aktivitas domestik masyarakat, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan kegiatan ekonomi yang turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi sampah.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 21 kecamatan dan 385 desa/kelurahan yang sebagian besar berada di kawasan dataran tinggi. Wilayah ini dikenal memiliki berbagai potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata dengan keberadaan Candi Borobudur dan kawasan lereng Gunung Merapi, serta kegiatan pertanian dan industri kecil berbasis agro. Beragam aktivitas ekonomi dan sosial tersebut mendorong peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya volume timbulan sampah di Kabupaten Magelang.

Tabel 1. 3 Timbulan sampah di Kabupaten Magelang

Tahun 2020 - 2021 dan 2023 - 2024

No.	Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
1.	2020	680.91	248,530.33
2.	2021	681.65	248,800.43
3.	2023	662.38	241,767.97
4.	2024	668.71	244,077.51

Sumber: <https://pusaka.magelangkab.go.id/data-sektoral>
diakses pada 10 Oktober 2025

Berdasarkan data pada tabel, volume timbulan sampah di Kabupaten Magelang pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, bukan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020 timbulan sampah tercatat sebesar 680,91 ton per hari, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 681,65 ton per hari. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 662,38 ton per hari sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 668,71 ton per hari. Pola yang serupa juga terlihat pada timbulan sampah tahunan.

Kondisi fluktuatif tersebut menunjukkan bahwa permasalahan persampahan di Kabupaten Magelang masih memerlukan perhatian serius. Meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, volume sampah tetap berada pada angka yang tinggi sehingga berpotensi membebani kapasitas pengelolaan, mempersempit ruang lingkungan, serta berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu

dilaksanakan secara optimal dan konsisten dengan mengacu pada kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku di Kabupaten Magelang.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini mengamanatkan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Magelang untuk berperan aktif dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, baik melalui pembentukan regulasi desa maupun melalui pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa (BPS Kabupaten Magelang, 2024) menghasilkan timbulan sampah harian yang cukup tinggi, sementara kapasitas pengangkutan dan pengelolaannya masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian sampah tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan berakhir menumpuk di lingkungan sekitar. Situasi tersebut menuntut adanya inovasi dan strategi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa sebagai bagian dari upaya mengurangi beban TPA sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kabupaten Magelang memiliki infrastruktur pengelolaan sampah berupa lima Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 140 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle/Unit Pengolahan Sampah (TPS 3R/UPS) yang tersebar di berbagai wilayah desa.

Salah satu desa di Kabupaten Magelang yang memiliki kebijakan pengelolaan sampah berbasis desa adalah Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak. Melalui Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, pemerintah desa membentuk TPS 3R Giri Mulya yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Girirejo sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), TPS 3R Giri Mulya berupaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos serta pemanfaatan sampah anorganik melalui kegiatan daur ulang.

Tempat Pengelolaan Sampah berbasis paradigma *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R) pada dasarnya dirancang untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari sumber, meminimalkan volume sampah melalui pemanfaatan kembali material yang masih bernilai guna, serta memastikan proses pengelolaan sampah dilakukan secara ramah lingkungan. Konsep 3R tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan. Menurut (Trisnawati & Agustana, 2018), prinsip 3R meliputi:

1. *Reduce*, yakni upaya mengurangi timbunan sampah sejak dari sumber melalui perubahan pola konsumsi menjadi lebih efisien, misalnya dengan memilih produk yang dapat digunakan kembali dan mengurangi penggunaan bahan sekali pakai;
2. *Reuse*, yaitu pemanfaatan kembali sampah atau material layak pakai secara langsung sesuai fungsi semula maupun fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, seperti menggunakan wadah atau kemasan berulang kali; dan
3. *Recycle*, yaitu kegiatan mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bernilai guna, misalnya pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.

Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan sampah telah ditetapkan baik pada tingkat nasional, daerah, maupun desa, implementasinya di tingkat lokal sering kali tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan. Dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas implementasi di lapangan.

Dalam konteks Desa Girirejo, keberadaan TPS 3R Giri Mulya menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah

berbasis masyarakat. Bahkan, TPS 3R Giri Mulya telah memperoleh sejumlah penghargaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun demikian, penghargaan tersebut belum tentu sepenuhnya merepresentasikan keberhasilan implementasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh. Masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, seperti keterbatasan cakupan layanan, kapasitas pengelolaan, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo. Evaluasi ini diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya dalam implementasi Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 di Desa Girirejo pada tahun 2025?
2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya dalam implementasi Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang pada tahun 2025
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :

A. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis desa melalui skema TPS 3R.
- b. Memperkaya literatur Ilmu Pemerintahan terkait analisis kinerja kebijakan publik berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas dan kinerja kebijakan pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

B. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Girirejo, pengelola TPS 3R Giri Mulya,

dan BUMDes dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah agar lebih efektif, efisien, merata, dan berkelanjutan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu selain dijadikan sebagai sumber informasi pendukung terkait penelitian ini, namun juga memungkinkan peneliti untuk menempatkan temuan penelitian dalam kerangka teori-teori yang relevan mengenai evaluasi kebijakan. Selain itu, studi-studi terdahulu dapat dijadikan referensi utama guna memperkaya perspektif analitis terhadap riset-riset sejenis, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, bagian ini menyajikan sejumlah literatur terkait yang mendukung penelitian yang dilakukan. Meskipun belum ditemukan penelitian dengan judul identik, terdapat beberapa karya ilmiah lain yang dapat dijadikan dasar rujukan dan bahan pengembangan bagi kajian ini, di antaranya:

Penelitian pertama dari (Pajaryuanda, 2019) dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun)” Latar belakang penelitian ini berakar pada persoalan struktural pengelolaan limbah padat di Kabupaten Karimun, khususnya wilayah Kecamatan Kundur Barat, di mana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2013 terus bergulat dengan kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kedisiplinan perilaku warga, serta ketidaktegasan dalam penegakan sanksi administratif. Akibatnya, terjadi akumulasi limbah yang masif di lahan terbuka, alur sungai, dan sistem drainase, yang pada gilirannya mengancam kesejahteraan kesehatan publik serta

keberlanjutan ekosistem regional. Oleh karena itu, evaluasi mendalam menjadi imperatif untuk mengungkap ketidaksesuaian mendasar antara kerangka regulasi formal dan dinamika implementasi di lapangan.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk membedah tingkat efektivitas pelaksanaan Perda tersebut, sekaligus mengungkap faktor-faktor struktural yang menjadi penghalang utama. Pendekatan metodologis yang diadopsi bersifat kualitatif dominan, dilengkapi dengan analisis deskriptif kuantitatif, melalui desain studi kasus yang difokuskan pada Kecamatan Kundur Barat. Pengumpulan data primer dilakukan via instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada 14 informan kunci meliputi perwakilan aparatur pemerintahan daerah dan elemen masyarakat serta pengamatan langsung di situs. Analisis data mengandalkan teknik deskriptif dengan skala interval kategorikal (seperti "cukup baik" atau "kurang baik") untuk mengukur persepsi, diimbangi dengan triangulasi sumber guna memperkuat validitas interpretasi. Temuan utama mengindikasikan bahwa tingkat implementasi Perda secara agregat berada dalam kategori "cukup baik", meskipun terdapat disparitas mencolok antara persepsi subjektif informan dan bukti empiris dari observasi.

Penilaian difokuskan pada tiga dimensi kunci: (1) kondisi sistem angkutan limbah (termasuk kelayakan dan komposisi armada kendaraan), yang dinilai "cukup baik" oleh responden, tetapi pengamatan lapangan justru mengungkap ketidakcukupan infrastruktur yang sistemik; (2) tingkat ketertiban komunal (berkaitan dengan lokasi dan pola pembuangan), yang juga dikategorikan "cukup baik" berdasarkan data kuesioner, namun temuan observasional menyoroti

prevalensi pembuangan liar yang ekstensif; serta (3) mekanisme sanksi dan pengenaan denda (encompassing proses pemungutan dan penindakan), yang dinyatakan "cukup baik" oleh pihak pemerintah, tetapi dianggap "kurang memadai" oleh masyarakat, disertai minimnya aksi penegakan hukum yang konkret.

Faktor inhibisi primer meliputi defisit anggaran yang kronis, yang menghambat penyediaan fasilitas esensial, serta tingkat partisipasi masyarakat yang suboptimal akibat pengawasan yang longgar dan penegakan regulasi yang tidak konsisten. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menggarisbawahi urgensi integrasi holistik antara alokasi sumber daya, program edukasi berkelanjutan, dan penegakan hukum yang tegas, sebagai prasyarat untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan limbah pada skala daerah.

Penelitian kedua dari (Wandira et al., 2022) dengan judul “Evaluasi Program Pengolahan Bank Sampah di TPS 3R KSM Intan Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Deli Serdang”. Fondasi intelektual penelitian ini tertanam pada dinamika krisis persampahan di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dimana eskalasi volume limbah domestik dipicu oleh ekspansi demografis dan minimnya kesadaran kolektif terhadap prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sehingga menimbulkan akumulasi limbah yang sistematis, yang kemudian menggerogoti kesehatan masyarakat dan mempercepat degradasi ekosistem lokal.

Inisiatif bank sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R) Kelompok Sadar Masyarakat (KSM) Intan dirancang sebagai respons partisipatif terhadap fenomena ini, dengan tujuan mengintegrasikan mekanisme pengolahan

limbah yang inklusif; namun demikian, evaluasi komprehensif diperlukan untuk mengukur kesesuaian implementasinya terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pelaksanaan 3R. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk mendelineasi evaluasi program pengolahan bank sampah tersebut, dengan penekanan pada deskripsi mendalam terhadap dinamika operasional dan outcome-nya.

Pendekatan metodologis yang dianut bersifat kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data primer difasilitasi melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, observasi partisipatif yang imersif terhadap alur kegiatan, serta scrutiny dokumen arsip terkait aktivitas KSM Intan. Proses analisis data bersifat naratif, difokuskan pada identifikasi kekuatan dan defisiensi program melalui lensa indikator proses, manfaat substantif, dan implikasi dampak, yang diperkuat oleh triangulasi sumber guna menjamin kredibilitas interpretasi.

Temuan empiris mengindikasikan bahwa program pengolahan bank sampah telah mencapai tingkat efektivitas yang memadai, terutama pada ranah indikator proses, di mana komunitas secara konsisten mematuhi tujuh etape esensial sesuai doktrin 3R: mulai dari segregasi limbah berdasarkan kategori dan proses pembersihan awal, penyerahan terstruktur, penimbangan berkala oleh petugas, registrasi hasil timbang, pencatatan transaksi penjualan ke dalam ledger tabungan, distribusi hasil yang equitabel antara pengolah dan penabung, hingga optimalisasi pengangkutan residu.

Dimensi manfaat program terwujud secara multidimensi, mencakup aspek sosial (penguatan kohesi komunal melalui kolaborasi), ekonomi (generasi

pendapatan suplemen bagi partisipan), dan lingkungan (penurunan substansial volume limbah yang dialokasikan ke Tempat Pembuangan Akhir). Lebih lanjut, implikasi jangka panjang mencakup transformasi perilaku kolektif yang lebih responsif terhadap isu lingkungan, ditandai dengan eskalasi kesadaran umum terhadap pengelolaan persampahan.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan viabilitas model bank sampah sebagai paradigma pengelolaan limbah yang berbasis masyarakat, meskipun imperatif penguatan dukungan institusional tetap mendesak untuk menjamin kontinuitas dan skalabilitasnya dalam perspektif temporal panjang.

Penelitian ketiga dari (Tauran, 2021) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah pada Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo”. Fondasi konseptual penelitian ini tertanam pada persoalan struktural pengelolaan persampahan di kompleks perumahan Permata Kwangsan Residence, Kabupaten Sidoarjo, di mana lonjakan volume limbah domestik yang dipicu oleh dinamika urbanisasi dan pola konsumsi masyarakat yang cenderung eksekutif dengan menghasilkan akumulasi residu yang tidak terstruktur, sehingga berpotensi memicu risiko kesehatan publik, degradasi estetika lingkungan, serta tekanan berlebih pada infrastruktur pengelolaan sampah regional.

Walaupun inisiatif bank sampah telah diadopsi sebagai strategi partisipatif untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular, evaluasi sistematis tetap esensial guna mengukur konformitasnya terhadap kerangka regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, sekaligus mengungkap kekuatan

inheren serta domain perbaikan yang mendukung keberlanjutan ekosistem secara holistik. Secara presisi, penelitian ini bertujuan untuk membedah sistem tata kelola bank sampah di perumahan tersebut, dengan penekanan pada aspek operasional dan kebijakan.

Pendekatan metodologis yang dianut bersifat deskriptif kualitatif, di mana komposisi data mencakup sumber primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap alur operasional bank sampah, wawancara mendalam dengan pengelola, nasabah, serta aktor pemangku kepentingan, serta sumber sekunder berupa dokumen regulasi dan arsip laporan kegiatan. Proses analisis data dilakukan secara tematik, dengan rujukan eksplisit pada indikator-indikator yang diamanatkan dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021, yang diperkaya oleh triangulasi sumber guna menjamin keabsahan dan reliabilitas interpretasi.

Temuan substantif mengindikasikan bahwa tata kelola Bank Sampah Berkah secara keseluruhan telah mencapai tingkat efektivitas yang memadai, dengan penilaian yang berfokus pada empat dimensi kunci. Pertama, struktur kelembagaan dinyatakan efektif karena selaras dengan ketentuan regulasi, sebagaimana dibuktikan oleh kompetensi pengelola yang telah ditempa melalui program pelatihan dari Bank Sampah Induk (BSI) Makmur Sejati, sehingga memungkinkan eksekusi mandat secara profesional dan adaptif. Kedua, jangkauan pelayanan mencapai distribusi yang merata, dengan empiris bahwa seluruh nasabah berasal dari residen perumahan yang menerima layanan secara inklusif dan komprehensif. Ketiga, responsivitas nasabah bersifat proaktif, di mana komunitas menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap eksistensi dan kualitas layanan

bank sampah, yang mencerminkan akseptabilitas yang kuat di tingkat grassroots. Keempat, Standar Operasional Prosedur (SOP) dinilai efisien secara relatif, meliputi elemen-elemen seperti jadwal operasional, mekanisme pelayanan nasabah, proses penjemputan residu, kriteria jenis dan berat minimum sampah, penetapan tarif, kondisi kualitas limbah, fasilitas penyimpanan, serta skema distribusi hasil, semuanya kongruen dengan arahan Permen LHK.

Secara keseluruhan, hasil ini mengukuhkan peran bank sampah sebagai alat kebijakan lingkungan yang inklusif dan transformatif, meskipun peningkatan efisiensi SOP tetap menjadi prioritas strategis untuk mengoptimalkan performa jangka panjang dalam kerangka pengelolaan limbah urban yang dinamis.

Penelitian keempat dari oleh (Hardiyanti & Purnaweni, 2020) berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalikondang, Kabupaten Demak, di mana peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan ketidakefisienan sistem, termasuk praktik open dumping yang tidak ramah lingkungan, keterbatasan infrastruktur, dan ketidakoptimalan alokasi anggaran, yang pada akhirnya menimbulkan risiko kontaminasi tanah, air, dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan formal pengelolaan sampah dengan implementasi lapangan, sehingga evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan operasional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kalikondang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Demak dan masyarakat sekitar, observasi langsung terhadap proses operasional TPA, serta analisis data sekunder berupa dokumen kebijakan dan laporan anggaran. Analisis dilakukan secara tematik dengan merujuk pada kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang menekankan aspek proses, output, dan outcome kebijakan, untuk mengungkap disparitas antara perencanaan dan realisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Kalikondang belum mencapai tingkat maksimal, terhambat oleh beberapa faktor kunci. Praktik *open dumping* masih dominan, yang menyebabkan emisi metana dan pencemaran lingkungan; sarana dan prasarana pendukung seperti alat pengolahan sampah terbatas; pengangkutan sampah seringkali tidak sesuai jadwal, mengakibatkan penumpukan di lokasi sementara; alokasi biaya yang tidak proporsional, hanya difokuskan pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk truk pengangkut dan pengadaan lahan timbunan, tanpa investasi pada teknologi ramah lingkungan; serta respons DLH Kabupaten Demak terhadap keluhan masyarakat yang bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah secara substantif.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada alokasi anggaran yang tepat dan merata, sebagaimana relevan

dengan penelitian saat ini yang menekankan distribusi sumber daya untuk optimalisasi tujuan kebijakan.

Penelitian kelima dari (Janatun et al., 2023) dengan judul “Evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung”. Penelitian ini beranjak dari latar belakang mengenai implementasi kebijakan publik, di mana terdapat kesenjangan antara desain regulasi dan praktik operasional di lapangan, sehingga mendorong perlunya suatu kajian evaluatif. Dari sisi metode penelitian, studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang dipakai untuk menganalisis secara komprehensif proses implementasi kebijakan, dengan fokus pada aspek efektivitas dan dampak dari regulasi pengelolaan sampah yang diterapkan.

Kemudian, Temuan penelitian mengungkap bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi dua isu kritis yaitu: yang pertama mengenai bagaimana lemahnya penegakan aturan atau *law enforcement* sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih tergolong rendah, kemudian terkait penyediaan kapasitas penampungan oleh Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak proporsional dengan volume sampah yang dihasilkan. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi terhadap terganggunya kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat.

Penelitian selanjutnya oleh (Zumaira et al., 2026) berjudul “Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Sampah di TPS 3R: Studi Kasus Kota Magelang” dilatarbelakangi oleh rendahnya kontribusi TPS 3R dalam mengurangi timbulan

sampah ke TPA, meskipun secara normatif diposisikan sebagai instrumen strategis pengurangan sampah dari sumber. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas operasional, rendahnya cakupan layanan, ketidakseimbangan antara volume sampah dan kemampuan pengolahan, serta fluktuasi partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah pada empat TPS 3R aktif di Kota Magelang dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung data kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis berdasarkan indikator efektivitas yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, regulasi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas TPS 3R berada pada kategori moderat dengan variasi kinerja antar unit. TPS 3R telah menjalankan fungsi pengumpulan dan pemilahan serta menghasilkan produk olahan, namun cakupan layanan yang terbatas membuat kontribusi terhadap pengurangan beban TPA belum signifikan. Kendala utama meliputi keterbatasan sarana, kapasitas SDM, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat yang belum konsisten.

Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji evaluasi pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Namun, penelitian Zumaira et al. berfokus pada efektivitas operasional, sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R dengan kerangka evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Beberapa penelitian terkait kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan

hidup yang berkaitan erat kualitas hidup masyarakat, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Penelitian sebelumnya, menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih mengalami kendala dikarenakan adanya ketimpangan antara infrastruktur pengelolaan sampah dengan timbulan sampah yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam mengkaji evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada fokus penelitian ini yang lebih memfokuskan pada satu TPS 3R di Kabupaten Magelang, yaitu TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo Kecamatan Ngablak, yang merupakan peraih penghargaan pengelolaan sampah baik di Kabupaten Magelang maupun di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip oleh (Abdoellah & Rusfiana, 2016), kebijakan publik didefinisikan sebagai segala bentuk keputusan atau tindakan yang secara sadar dipilih oleh pemerintah untuk diimplementasikan, atau justru sengaja dibiarkan tidak terealisasi. Konsepsi ini menegaskan bahwa esensi kebijakan publik terletak pada proses selektif pemerintah dalam merespons isu-isu publik, di mana berbagai faktor pertimbangan seperti keterbatasan sumber daya, prioritas politik, dan dinamika sosial menentukan apakah suatu opsi dapat dieksekusi atau ditangguhkan, sehingga mencerminkan peran negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan urusan bersama.

Sementara itu, Charles O. Jones, sebagaimana dikutip oleh (Abdoellah & Rusfiana, 2016), menggambarkan kebijakan publik sebagai interaksi dinamis antara unit pemerintahan dengan konteks lingkungannya, yang menyoroti ketergantungan pemerintah terhadap faktor eksternal seperti dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam merumuskan respons terhadap isu-isu publik. Pendekatan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan tidaklah statis, melainkan merupakan proses adaptif di mana pemerintah sebagai aktor institusional terus bernegosiasi dengan realitas lingkungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepentingan bersama.

Selanjutnya, Chief J.O. Udoji dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan strategis yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, sehingga menekankan peran kebijakan sebagai instrumen intervensi yang proaktif dalam mitigasi risiko sosial dan peningkatan kesejahteraan kolektif. Konsepsi ini memperkuat gagasan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik, di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator utama dalam mengelola dampak-dampak yang timbul dari ketidakstabilan lingkungan sosial.

Di sisi lain, (Alisjahbana, 2004) memandang kebijakan sebagai keputusan strategis yang diambil oleh pejabat pemerintahan demi mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, yang mencerminkan sintesis holistik dari berbagai pendapat, aspirasi, dan tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kepada negara. Konsepsi ini menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar instrumen administratif,

melainkan manifestasi dari dialog antara pemerintah dan warganya, di mana kepentingan kolektif menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, proses pembentukan kebijakan publik, sebagaimana diuraikan oleh William N. Dunn dalam (Winarno, 2012), terdiri dari tahapan-tahapan sistematis yang saling terkait, mulai dari penyusunan agenda hingga evaluasi akhir dengan rincian:

1. Penyusunan Agenda

Tahapan pembuatan kebijakan publik diawali dengan adanya keterlibatan penilaian yang mendalam terhadap urgensi dan relevansi suatu isu publik, dengan mempertimbangkan esensi masalah serta keterlibatan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa isu tersebut layak dimasukkan ke dalam prioritas kebijakan nasional.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Dilanjutkan tahapan di mana pembuat kebijakan mengidentifikasi dan mendefinisikan isu-isu yang telah teragenda, kemudian merancang berbagai alternatif solusi yang paling adaptif terhadap kondisi lapangan, sehingga menghasilkan opsi-opsi yang rasional dan kontekstual.

3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Kemudian memasuki tahapan adopsi kebijakan yaitu mengkonsolidasikan pemilihan alternatif terbaik melalui dukungan mayoritas dari aktor-aktor kunci, seperti lembaga legislatif dan putusan yudisial, yang menjamin legitimasi formal dari kebijakan yang dihasilkan.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pada tahap ini dilaksanakannya penghubung antara rancangan dan realitas, melibatkan eksekusi program oleh hierarki birokrasi dari tingkat bawah hingga atas, di mana dinamika kepentingan antarpihak sering kali memunculkan elemen pendukung sekaligus hambatan struktural, seperti resistensi organisasional atau keterbatasan sumber daya, yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan.

5. Evaluasi Kebijakan

Tahapan terakhir ini berfungsi sebagai mekanisme reflektif untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran, dengan menilai dampak positif maupun negatif yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, sehingga memungkinkan penyesuaian kebijakan di masa depan guna mendukung transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari beberapa konsep kebijakan publik yang dijelaskan oleh beberapa ahli, memperkuat pemahaman bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan pilihan strategis yang diambil oleh aparatur negara dengan kesadaran penuh untuk mengatasi isu-isu sosial melalui mekanisme yang terstruktur, berbasis rasionalitas, dan fleksibel dalam menanggapi perubahan konteks sosial-ekonomi-politik. Inti dari perspektif para ahli tersebut, menggarisbawahi bahwa kebijakan publik melampaui sekadar rutinitas birokratis, melainkan juga berperan sebagai alat negara yang esensial dalam mengkonfigurasi tatanan kehidupan masyarakat, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan bersama yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai produk dari dialog dinamis antara institusi pemerintahan dan aktor masyarakat, di mana aspirasi kolektif dirumuskan menjadi keputusan yang sah secara formal dan berfokus pada utilitas publik, melalui siklus iteratif yang mencakup penetapan agenda, perumusan alternatif, adopsi formal, pelaksanaan operasional, serta evaluasi kritis untuk memastikan adaptasi berkelanjutan terhadap kebutuhan empiris.

1.6.2 Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson, sebagaimana dikutip oleh (Rantung, 2024) mendefinisikan evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses penilaian komprehensif terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, dengan penekanan pada aspek substansial (seperti isi dan tujuan kebijakan), mekanisme pelaksanaannya, serta konsekuensi atau dampak yang muncul di tingkat empiris. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa evaluasi bukan sekadar audit formal, melainkan analisis holistik yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk merefleksikan efektivitas kebijakan dalam konteks realitas sosial, sehingga mengidentifikasi kekuatan struktural sekaligus potensi revisi untuk optimalisasi di masa depan.

Sementara itu, Mustopadijaja dalam (Rantung, 2024) memandang evaluasi kebijakan sebagai instrumen diagnostik untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam eksekusi kebijakan, yang secara implisit menyoroti peran evaluasi sebagai mekanisme verifikasi pencapaian tujuan yang dirancang, di mana kegagalan dapat ditelusuri ke akar masalah operasional atau ketidaksesuaian dengan dinamika lapangan. Konsepsi ini memperkuat gagasan bahwa evaluasi

kebijakan berfungsi sebagai alat akuntabilitas negara, memastikan bahwa intervensi publik tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga berkontribusi pada transformasi kualitatif dalam tata kelola urusan bersama.

Selanjutnya, James Anderson (1969), sebagaimana dikutip oleh (Akbar & Mohi, 2018), mengklasifikasikan evaluasi kebijakan ke dalam tiga kategori konseptual yang saling melengkapi, mencerminkan dimensi fungsional, operasional, dan analitis dalam pengukuran kebijakan publik. Pertama, evaluasi kebijakan diposisikan sebagai aktivitas fungsional yang inheren, di mana proses penilaian ini dianggap memiliki bobot esensial yang setara dengan tahap perumusan dan implementasi kebijakan itu sendiri, sehingga menjadikannya elemen integral dalam siklus pengelolaan urusan negara. Kedua, evaluasi difokuskan pada aspek efektivitas kebijakan, yaitu penilaian apakah kebijakan tersebut berfungsi secara optimal atau justru mengalami ketidakefektifan dalam mencapai output yang diharapkan, yang menyoroti peran evaluasi sebagai mekanisme diagnostik untuk mendeteksi kegagalan struktural atau keberhasilan implementatif. Ketiga, evaluasi kebijakan bersifat sistematis dan objektif, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap program-program kebijakan guna mengukur implikasi empirisnya terhadap masyarakat, termasuk sejauh mana tujuan yang dirumuskan secara eksplisit telah terealisasi, sehingga memungkinkan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Pendekatan ini secara keseluruhan memperkuat evaluasi sebagai instrumen reflektif yang mendukung akuntabilitas dan adaptasi kebijakan dalam konteks dinamis tata kelola publik.

Kemudian, teori evaluasi menurut (Dunn, 2003) secara esensial menguraikan evaluasi kebijakan sebagai mekanisme produksi pengetahuan yang mendalam mengenai nilai normatif atau kegunaan instrumental dari suatu kebijakan, yang pada intinya berperan sebagai fondasi reflektif untuk mempertajam proses pengambilan keputusan dalam ranah administrasi publik. Konsepsi ini selaras dengan pandangan (Dunn, 2003), yang memposisikan evaluasi kebijakan sebagai bentuk penilaian ideal yang sistematis, dengan merumuskan enam kriteria analitis yang saling terkait untuk mengukur kinerja kebijakan secara holistik dengan rincian:

1. Efektivitas (*effectiveness*), menyoroti kapasitas suatu alternatif kebijakan dalam merealisasikan hasil atau implikasi dapat memperoleh suatu pencapaian tujuan substantif yang diharapkan. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh kesesuaian suatu kebijakan antara tujuan normatif yang dirumuskan pembuat kebijakan dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan.
2. Efisiensi (*efficiency*), merupakan proporsi upaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas optimal atau yang diharapkan.
3. Kecukupan (*adequacy*), berkaitan dengan sejauh mana suatu hasil yang ingin dicapai dari kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai, dengan menilai kekuatan hubungan kausal antara desain kebijakan dan outcome yang diharapkan, sehingga menghindari ketidakseimbangan antara intervensi dan realitas sosial.

4. Pemerataan (*equity*) berfokus pada prinsip keadilan dalam pendistribusian kebijakan secara adil di antara kelompok masyarakat yang berbeda, seperti berdasarkan kelas sosial, gender, atau etnis secara prosedural dan substantif.
5. Responsivitas (*responsiveness*), berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sasaran. Aspek ini menjadi penting karena suatu kebijakan akan kehilangan relevansinya apabila tidak mampu merespons kepentingan nyata dari kelompok yang seharusnya memperoleh manfaat.
6. Ketepatan (*appropriateness*), merujuk pada nilai kepastian dalam pelaksanaan kebijakan dengan mencerminkan tingkat konsistensi dan kepastian arah tindakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan atau program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran, sehingga tujuan yang dirumuskan tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga relevan dan tepat guna bagi konteks sosial tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Kaitannya dengan kebijakan pengelolaan sampah pada TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo Kabupaten Magelang yang diteliti adalah penulis menggunakan enam kriteria milik William Dunn yang kemudian menurut penulis mampu menjelaskan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo Kabupaten Magelang tersebut.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk memahami proses evaluasi pelaksanaan kebijakan secara komprehensif. Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada enam variabel utama yang menurut Dunn memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan mengkaji keenam variabel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan kebijakan dalam konteks yang diteliti.

Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan dari teori William Dunn tersebut terdapat enam variabel yang dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep Model William Dunn

Variabel Evaluasi Kebijakan	Indikator	Operasionalisasi
Efektivitas	1. Ketercapaian kebijakan; 2. Hasil nyata dari implementasi kebijakan; 3. Dampak nyata terhadap masyarakat sasaran.	Mengukur sejauh mana penurunan volume timbulan sampah, kemampuan TPS 3R Giri Mulya dalam mengolah sampah rumah tangga menjadi barang yang lebih bernilai, dan kesehatan lingkungan hidup masyarakat.
Efisiensi	1. Rasionalitas penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga, dan waktu); 2. Ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan; 3. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Menilai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan apakah sudah proporsional antara hasil dengan sumber daya yang dikeluarkan termasuk efisiensi penggunaan dana desa melalui tarif berbayar

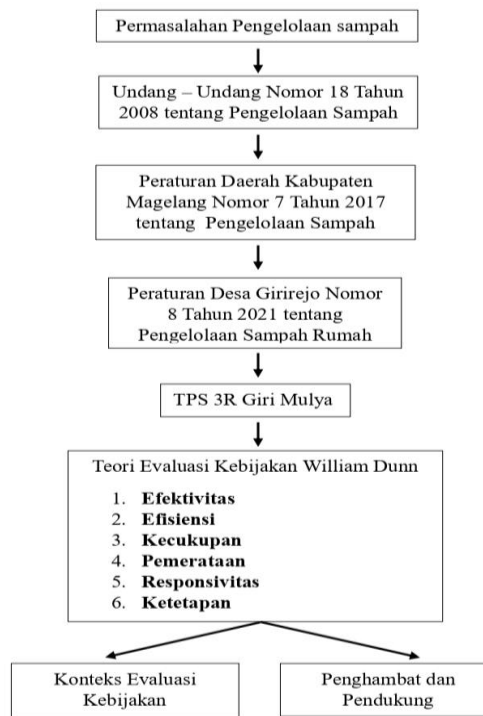
Variabel Evaluasi Kebijakan	Indikator	Operasionalisasi
	kebijakan.	pengambilan sampah, pekerja, dan fasilitas pendukung seperti mobil, bak sampah, dan fasilitas lainnya.
Kecukupan	1. Relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat; 2. Ketercukupan hasil dalam mengatasi permasalahan sampah; 3. Keberlanjutan hasil kebijakan dalam jangka panjang.	Mengidentifikasi sejauh mana pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya mampu mengurangi volume timbulan sampah yang kemudian mampu meningkatkan kesehatan lingkungan hidup masyarakat di Desa Girirejo dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dengan menghasilkan produk bernilai jual dari sampah rumah tangga.
Pemerataan	1. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan; 2. Kesetaraan akses terhadap layanan pengelolaan sampah; 3. Distribusi manfaat ekonomi dan lingkungan secara merata.	Mengidentifikasi sejauh mana pengelolaan sampah TPS 3R Giri Mulya dirasakan oleh sepuluh dusun di Desa Girirejo tanpa adanya kesenjangan baik dalam akses, partisipasi, maupun penerimaan manfaat program.
Responsivitas	1. Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan; 2. Respon pemerintah desa dan pengelola terhadap masukan dan keluhan masyarakat; 3. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan.	Melihat sejauh mana pengelola TPS 3R Giri Mulya tanggap terhadap keluhan, aspirasi, dan usulan masyarakat serta mampu melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif di sepuluh dusun yang ada di Desa Girirejo.

Variabel Evaluasi Kebijakan	Indikator	Operasionalisasi
Ketetapan	1. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan normatif dan tujuan yang ditetapkan; 2. Konsistensi dan kepastian arah pelaksanaan kebijakan; 3. Keterpaduan kebijakan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat.	Menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021, serta relevansi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat yang notabene bermata pencaharian petani sehingga terdapat banyak volume sampah organik yang kemudian diolah sebagai pupuk kompos sebagai keberlanjutan program pengelolaan sampah desa.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis

Penelitian ini menempatkan permasalahan pengelolaan sampah dalam kerangka regulasi berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017, hingga Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021, yang diimplementasikan melalui TPS 3R Giri Mulya sebagai instrumen pelaksana di tingkat desa. Evaluasi kebijakan dilakukan menggunakan kriteria William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan untuk menilai kinerja kebijakan serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut (Moleong, 2009), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk dapat memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi aspek perilaku, persepsi, tindakan, dan aspek lainnya secara menyeluruh. Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk kata-kata atau bahasa, serta menerapkan berbagai prosedur yang bersifat alami. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada realitas atau kejadian yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan deskriptif yang berupa uraian atau narasi. Menurut (Sugiyono, 2019) dijelaskan bahwasannya penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat *post positivisme* yang biasanya digunakan dalam penelitian yang meneliti kondisi objektif secara alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa Girirejo, BUMDes Desa Girirejo, dan TPS 3R Giri Mulya yang ada di Desa Girirejo yang terus beroperasi secara aktif. TPS 3R Giri Mulya ini merupakan TPS yang menerapkan kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang di mana pada tahun 2023 berhasil meraih penghargaan sebagai Juara I Lomba Desa Gemar Mengolah

Sampah (De'Gemes) Kabupaten Magelang serta ditetapkan sebagai Desa Mandiri Sampah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup pihak - pihak yang berperan ataupun terdampak secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya, serta pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Kemudian teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dimana pada purposive sampling pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan peneliti, informan yang dipilih yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dipilih atas dasar faktor berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Kriteria informan yang sesuai dengan penelitian ini menurut peneliti yaitu:

1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Girirejo yang juga menjabat sebagai Komisaris TPS 3R Giri Mulya menjalankan fungsi pengaturan, pengelolaan, serta pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah sehubungan dengan meninggalnya Kepala Desa Girirejo.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan sampah, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat.

3. Sekretaris Desa Girirejo sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo.
4. Bendahara Desa Girirejo sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola keuangan desa mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
5. Staf BUMDes Desa Girirejo yang memiliki tanggung jawab terhadap operasional TPS 3R Giri Mulya berdasarkan Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021, sehingga keterlibatannya merepresentasikan pelaksana teknis kebijakan pengelolaan sampah desa.
6. Unit pengelola TPS 3R Giri mulya sebagai pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah, unit pengelola berperan strategis sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah desa dengan praktik pengelolaan yang dilaksanakan di lapangan.
7. Masyarakat Desa Girirejo sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya.

Tabel 1.5 Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kasi Pemerintahan Desa Girirejo	1 Orang
2.	BPD Desa Girirejo	1 Orang
3.	Sekretaris Desa Girirejo	1 Orang
4.	Bendahara Desa Girirejo	1 Orang
5.	Staf BUMDes Desa Girirejo	1 Orang
6.	Unit Pengelola TPS 3R Giri Mulya	1 Orang
7.	Masyarakat	5 Orang
JUMLAH		11 Orang

Sumber: Olahan Penulis

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi, narasi, pendapat, serta hasil observasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Data kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakan serta konteks sosial yang melingkupinya. Dalam penelitian kualitatif, sumber data memegang peranan penting, sebab ketepatan dalam mengklasifikasikan dan mengidentifikasi sumber berpengaruh terhadap kualitas serta kedalaman informasi yang diperoleh. Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti menggunakan dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut (Sugiyono, 2019) merupakan sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh

dengan melakukan studi lapangan secara langsung dan wawancara secara mendalam kepada narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder oleh (Sugiyono, 2019) dijelaskan sebagai data yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber penelitian yang bisa melalui orang lain atau bisa berupa dokumen. Data sekunder sendiri bisa ditemukan dari berbagai literatur seperti laporan, jurnal, buku, situs internet, dan lain - lain. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari berita dalam situs internet dan perundang - undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019), teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling fundamental dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019), wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi serta saling bertukar pandangan melalui tanya jawab, yang bertujuan untuk dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai suatu topik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk dapat memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri

Mulya di Desa Girirejo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta faktor - faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun penghambat dari implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pemerintah Desa Girirejo;
- b. BPD Desa Girirejo
- c. Sekretaris Desa Girirejo;
- d. Bendahara Desa Girirejo
- e. Staf BUMDes Desa Girirejo;
- f. Unit Pelaksana TPS 3R Giri Mulya
- g. Masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pengelolaan sampah dengan komposisi dari sepuluh dusun yang ada di Desa Girirejo.

Keempat belas informan ini dipilih karena dianggap memiliki pemahaman serta pengalaman yang relevan secara mendalam terkait kebijakan pengelolaan sampah, baik dari sisi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan teknis, maupun penerima dampak kebijakan di lapangan.

2. Observasi

Observasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan: secara langsung, dimana peneliti berinteraksi dan mengamati objek penelitian secara

langsung, atau secara tidak langsung, di mana pengamatan dilakukan melalui media seperti foto atau video. Dalam penelitian ini, observasi yang dipergunakan adalah observasi secara langsung yang dilakukan di TPS 3R Giri Mulya untuk meninjau tata cara serta kondisi fasilitas dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) dokumentasi merupakan sebuah catatan atau historis yang bersumber pada beberapa peristiwa yang sudah terjadi, biasanya berupa tulisan, gambar atau bahkan sebuah karya monumental dan lain-lain. Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan data yang sebelumnya sudah ada dan peneliti harus cermat dalam memilih beberapa data yang memang dianggap masih relevan dengan penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan memahami dokumen-dokumen seperti, tulisan, gambar ataupun karya, peraturan kebijakan, notulensi rapat, laporan kegiatan, berita acara, gambar dll, baik dari Pemerintah Desa Girirejo maupun pihak TPS 3R Giri Mulya.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh selama

proses penelitian, baik dari observasi lapangan maupun studi literatur, guna memperjelas deskripsi hasil penelitian terkait pengelolaan sampah di TPS 3R Giri Mulya Desa Girirejo. Teknik analisis data yang diterapkan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwasannya analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah proses pengumpulan data berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk langsung menganalisis tanggapan responden saat wawancara berlangsung. Dikatakan Sugiyono (2019), apabila data yang diperoleh dirasa kurang lengkap atau kurang kredibel, peneliti dapat melanjutkan penggalan informasi hingga data yang valid dan memadai diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2019), analisis data kualitatif melibatkan proses yang bersifat dua arah dan berkesinambungan untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif. Proses analisis tersebut terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data yang terkumpul disaring dan diringkas dengan menyoroti informasi penting yang relevan dengan pengelolaan sampah di TPS 3R Giri Mulya. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola utama sehingga data menjadi lebih terfokus dan memudahkan peneliti dalam mengelola serta mencari data tambahan jika diperlukan. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam kelompok-kelompok yang saling terkait dan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, diagram, atau narasi yang menggambarkan hubungan antar data. Penyajian ini memudahkan pemahaman terhadap pola dan temuan yang muncul dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Girirejo.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dianalisis dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Kesimpulan awal bersifat tentatif dan dapat berubah apabila data tambahan yang diperoleh selanjutnya tidak mendukung. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh data yang konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan mewakili hasil penelitian secara akurat.

1.9.7 Validasi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam, studi pustaka, serta observasi lapangan. Untuk dapat menjamin keabsahan data yang dikumpulkan, penulis mengaplikasikan metode triangulasi sebagai upaya dalam meningkatkan validitas data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan cara menelaah informasi dari berbagai sumber, menggunakan beragam teknik untuk mengumpulkan data, serta mempertimbangkan aspek waktu selama proses pengumpulan data berlangsung. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian

ini sesuai dengan penjabaran yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019) mengenai triangulasi sumber yang dijelaskan sebagai upaya untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo melalui unit pengelolaan TPS 3R Giri mulya.

Dalam penelitian ini, penulis secara khusus menerapkan triangulasi sumber sebagai pendekatan utama untuk dapat menguji keabsahan data. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan, seperti Kepala Seksi Pemerintahan Desa Girirejo, Sekretaris Desa Girirejo, Staf BUMDes Desa Girirejo, pengelola TPS 3R Giri Mulya, dan masyarakat setempat sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dan dapat dipercaya.

Triangulasi data juga dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber informan. Penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk dapat meningkatkan validitas data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara terhadap informan dengan hasil observasi secara langsung di lokasi TPS 3R Giri Mulya serta dokumentasi data yang relevan, seperti peraturan desa mengenai pengelolaan sampah dan dokumen mengenai pengelolaan sampah lainnya yang mendukung.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Di mana peneliti menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu untuk dapat menjaga fokus dan arah pembahasan tetap sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepada informan, dipertimbangkan berdasarkan aspek - aspek utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo.

Dalam proses wawancara, penulis tidak hanya mencatat jawaban, melainkan juga mencermati kesesuaian antara apa yang disampaikan informan dengan kondisi nyata yang diamati secara langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga mencocokkan pernyataan dari masing - masing informan dengan data tertulis dari dokumen resmi seperti peraturan desa tentang pengelolaan sampah serta dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah yang diperoleh dari perangkat Desa Girirejo dan pengelola TPS 3R Giri Mulya.